



LAPORAN PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN UKM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/ALLAH.S.W.T atas segala rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dengan tersusunnya Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat didalam penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019, yang nantinya akan dijadikan bahan pendukung dalam pembuatan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Utara. Semoga Bermanfaat dan dapat memenuhi apa yang dibutuhkan.

Tanjung Selor, 29 Januari 2021
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara



Drs. HARTONO, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196405071985031014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Dasar Hukum.....	1
1.2 Gambaran Umum	3
 BAB II GAMBARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	 4
2.1 Program dan Kegiatan	5
2.2 Alokasi Anggaran Murni dan Perubahan Tahun 2020	13
2.2.1 Alokasi Anggaran Murni dan Perubahan Tahun 2020	13
2.2.2 Realisasi Program dan Kegiatan APBD Tahun 2020	18
2.3 Kondisi Sarana dan Prasarana.....	25
2.3.1 Struktur Organisasi Tahun 2020	24
2.3.2 Personil OPD	26
2.3.3 Sarana dan Prasarana OPD	28
2.4 Permasalahan dan Solusi.....	32
 BAB III PENUTUP	 35

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Renja Dinas Perindagkop dan UKM Tahun 2020	5
Tabel 2.2	Alokasi Anggaran Untuk APBD Murni dan APBD Perubahan TA. 2020	13
Tabel 2.3	Laporan Fisik dan Keuangan Pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Disperindagkop & UKM Tahun 2020	18
Tabel 2.4	Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat/Gol. Ruang, Jenis Kelamin dan Pendidikan	26
Tabel 2.5	Tenaga Kerja Kontrak menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin ..	27
Tabel 2.6	Pegawai Negeri Sipil menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Pada masing-masing bidang.....	27
Tabel 2.7	Tenaga Kerja Kontrak menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Pada masing-masing bidang	28
Tabel 2.8	Daftar Inventaris Barang Disperindagkop & UKM	28
Tabel 2.9	Hambatan di Tahun Anggaran 2020	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Disperindagkop & UKM Tahun 2020	25
------------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 69 Ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Kepala Daerah Wajib Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah”.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, Pasal 1 ayat (8), disebutkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.

1.1 Dasar Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana kerja tahunan ini, antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.2 Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan wewenang untuk memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltara.

2. Sekretaris Dinas

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan koordinasi perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan.

3. Bidang Industri

Bidang Industri mempunyai tugas pokok melaksanakan dan penyiapan kebijakan, pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah, industri kimia dan agro, industri logam mesin, elektronika, matematika, transportasi dan aneka (ILMETA), Mengkoordinasikan, kerjasama kemitraan bidang industri, memberikan masukan/saran dalam rangka penerbitan izin usaha industri skala investasi diatas 10 milyar, dan izin kawasan industri lintas kabupaten/kota.

4. Bidang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi di bidang pembinaan pasar dan distribusi, melakukan perumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang jasa, perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pembinaan usaha perdagangan dan pendaftaran perusahaan.

5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Bidang Koperasi dan UKM mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia, fasilitasi pembiayaan permodalan dan pengembangan produksi usaha dan pemasaran koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, menengah serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi dan UKM.

BAB II

PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1 Program dan Kegiatan

Kebijakan terjabar dalam program kerja prioritas yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara. Berikut Program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif dan lokasi untuk mencapai tujuan dan sasaran disperindagkop dan UKM tahun anggaran 2020.

Tabel 2.1 Renja Dinas Perindagkop dan UKM Tahun 2020

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
			3.07.3.0 7.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp 3.075.627.000
			01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	5 Surat	Rp 11.601.039
			01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Rp 101.000.000
			01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	Rp1.287.600.000

		01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan / mesin yang dilakukan Perbaikan / Service	10 Unit	Rp15.000.000
		01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	Rp155.941.406
		01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Rp65.000.000
		01.13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	15 Unit	Rp64.000.000
		01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	100 Unit	Rp22.435.492
		01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	17 Eksemplar	Rp15.000.000
		01.17	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1130 Porsi	Rp74.431.692
		01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	63 Kali	Rp380.741.410

			01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah	86 Kali	Rp302.875.961
			01.21	Perjalanan Dinas Luar Negeri	Jumlah Perjalanan Dinas luar negeri yang dilakukan	1 Kali	Rp180.000.000
			01.22	Rapat Teknis Indagkop Se-Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Peserta yang mengikuti rapat	60 Orang	Rp400.000.000
			3.07.3.0 7.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp520.000.000
			02.11	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas	Jumlah rumah/gedung /gudang/ parkir kantor dinas yang disewa	1 Unit	Rp340.000.000
			02.24	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	16 Unit	Rp180.000.000
			3.07.3.0 7.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	82%	Rp71.979.670

			05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	25 Orang	Rp71.979.670
Meningkatkan Kontribusi sektor industri	Meningkatnya Daya Saing Industri	Persentase peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	3.07.3.0 7.01.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase industri kecil dan menengah yang sehat	30%	Rp710.000.000
			16.01	Pelatihan peningkatan Kemampuan bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan Sumber daya	Pelatihan peningkatan kemampuan bagi kemampuan IKM	15 IKM	Rp110.000.000
			16.06	Pembinaan dan pengembangan bagi pelaku Industri kecil dan menengah	Pembinaan dan pengembangan bagi kemampuan IKM	15 IKM	Rp500.000.000
			16.10	Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri	Jumlah sarana penunjang dari klaster industri yang terbangun	1 Sarana	Rp100.000.000
		Persentase Pertumbuhan Produksi IKM	3.07.3.0 7.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase IKM yang menerapkan IPTEK	7%	Rp500.400.000
			17.01	Kegiatan pembinaan kemampuan teknologi industri	Jumlah Sosialisasi, Bimtek/Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknologi	2 Sosialisasi/ Bimtek/Pelatihan	Rp200.400.000

			17.03	Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industry manufaktur	Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industry manufaktur	1 sosialisasi	Rp100.000.000
			17.06	Pengembangan system Inovasi teknologi industri	Pengembangan system inovasi teknologi industry	2 IKM	Rp200.000.000
Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	Persentase Produk/Barang beredar yang tidak layak konsumsi	3.06.3.0 7.01.15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Peredaran Barang/Jasa yang tidak memenuhi syarat ketentuan jual	39%	Rp450.000.000
			15.01	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	1 Raker	Rp100.000.000
			15.02	Penyelesaian Permasalahan - permasalahan konsumen	Jumlah fasilitasi penyelesaian masalah konsumen oleh BPSK	12 Bulan	Rp100.000.000
			15.03	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Jumlah Peningkatan dan Pengawasan Peredaran barang dan jasa	5 Kegiatan	Rp200.000.000
			15.07	Pengembangan dan pemanfaatan Sarana pengujian dan sertifikasi mutu Barang	Jumlah Pengembangan dan pemanfaatan sarana pengujian dan sertifikasi mutu barang	1 Perencanaan	Rp50.000.000

Meningkatkan Daya Saing Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor	3.06.3.0 7.01.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Jenis Komoditi Ekspor	44%	Rp900.000.000
		17.02	Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri	Jumlah Sistem Informasi Peluang Pasar yang dikelola	1 Sistem	Rp. 75.000.000
		17.08	Membangun jejaring dengan eksportir	Jumlah membangun jejaring dengan eksportir	2 Asosiasi	Rp75.000.000
		17.09	Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha	Jumlah Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait	10 Koordinasi	Rp100.000.000
		17.12	Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional	Jumlah pembangunan promosi perdagangan internasional	3 Kegiatan	Rp370.000.000
		17.13	Peningkatan kapasitas pelaku usaha perdagangan internasional	Jumlah peningkatan pelaku usaha perdagangan internasional	32 orang	Rp200.000.000
		17.14	Pengelolaan isu-isu perdagangan internasional	Pengelolaan isu-isu perdagangan internasional	10 Koordinasi	Rp80.000.000
	Kontribusi Sektor perdagangan	3.06.3.0 7.01.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase usaha perdagangan dalam negeri yang dibina	8%	Rp575.000.000

		terhadap PDRB	18.01	Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional	Pembuatan peraturan pengendalian harga barang pokok dikalimantan utara	1 peraturan	Rp
			18.04	Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	Jumlah Kegiatan pendistribusian barang yang diawasi	3 Kegiatan	Rp100.000.000
			18.06	Peningkatan system dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah Peningkatan system dan jaringan informasi perdagangan	1 sarana	Rp115.000.000
			18.07	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Jumlah sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	40 orang	Rp50.000.000
			18.08	Pembangunan Pasar Rakyat	Jumlah Pembangunan Pasar Rakyat	1 Pasar	Rp250.000.000
			18.09	Kegiatan Pasar Murah	Jumlah kegiatan Pasar murah	7 Kali	Rp60.000.000
Meningkatkan pertumbuhan koperasi dan UKM berkualitas	Meningkatkan pertumbuhan UKM dan Koperasi Sehat	Persentase UKM Produktif	2.11.16	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil	Persentase pertumbuhan UKM baru	25%	Rp2.255.000.000
			16.06	penyelenggaraa n pelatihan kewirausahaan	Jumlah Pelatihan kewirausahaan yang diikuti KUMKM	8 Kegiatan	Rp1.720.000.000
			16.07	Pelatihan Manajemen pengelolaan Koperasi/KUD	Jumlah pelatihan manajemen pengelola koperasi/KUD	30 Pengurus	Rp150.000.000

			16.08	Sosialisasi HAKI kepada usaha mikro kecil menengah	Jumlah sosialisasi HAKI kepada UKM	20 Orang	Rp105.000.000
			16.12	Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM	Jumlah penyelenggara an pameran promosi Produk UMKM	1 Pameran	Rp280.000.000
			16.18	Sosialisasi dukungan informasi penyesuaian permodalan	Jumlah sosialisasi dan pendampingan bantuan permodalan	1 kegiatan	Rp
		Persentase Koperasi sehat	3.15.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	69%	Rp270.000.000
			18.05	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	10 koperasi	Rp75.000.000
			18.09	Monitorig, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monitoring, evaluasi dan pelaporan	4 Laporan	Rp195.000.000
JUMLAH							Rp9.328.006.670

2.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran

2.2.1 Alokasi Anggaran Murni dan Perubahan Tahun 2020

Tabel 2.2 Anggaran Untuk APBD Murni dan APBD Perubahan Tahun 2020

Kode	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2020	
		Murni	Perubahan
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,813,000,947	3,817,837,981
5.1.1	Belanja Pegawai	4,813,000,947	3,817,837,981
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	215,211,905	223,513,839
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4,597,789,042	3,594,324,142
	BELANJA LANGSUNG	42,117,432,670	39,999,749,141
2.11 . 3.07.01.01 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah*	3,685,000,000	2,617,700,000
2.11 . 3.07.01.01 . 16 . 06	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	2,100,000,000	1,900,000,000
2.11 . 3.07.01.01 . 16 . 07	Pelatihan Manajemen Pengelolaan koperasi/KUD	1,150,000,000	429,380,000
2.11 . 3.07.01.01 . 16 . 08	Sosialisasi HAKI kepada usaha mikro kecil menengah	105,000,000	104,320,000
2.11 . 3.07.01.01 . 16 . 12	Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM	280,000,000	3,000,000
2.11 . 3.07.01.01 . 16 . 18	Sosialisasi dukungan informasi penyesuaian permodalan	50,000,000	181,000,000
2.11 . 3.07.01.01 . 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**	265,500,000	238,500,000

2.11 . 3.07.01.01 . 18 . 05	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	72,000,000	62,000,000
2.11 . 3.07.01.01 . 18 . 09	Monitoring,Evaluasi dan pelaporan	193,500,000	176,500,000
3.06 . 3.07.01.01 . 15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan*	475,600,000	410,900,000
3.06 . 3.07.01.01 . 15 . 01	Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	100,000,000	72,300,000
3.06 . 3.07.01.01 . 15 . 02	Penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	175,600,000	175,600,000
3.06 . 3.07.01.01 . 15 . 03	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan jasa	200,000,000	163,000,000
3.06 . 3.07.01.01 . 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor*	792,600,000	337,895,719
3.06 . 3.07.01.01 . 17 . 02	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	75,000,000	60,918,047
3.06 . 3.07.01.01 . 17 . 08	Membangun jejaring dengan eksportir	75,000,000	54,000,000
3.06 . 3.07.01.01 . 17 . 12	Pembangunan promosi perdagangan Internasional	370,000,000	69,003,440
3.06 . 3.07.01.01 . 17 . 13	Peningkatan kapasitas pelaku usaha perdagangan international	192,600,000	103,863,318
3.06 . 3.07.01.01 . 17 . 14	Pengelolaan Isu-isu Perdagangan Internasional	80,000,000	50,110,914

3.06 . 3.07.01.01 . 18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri*	21,682,936,333	22,131,377,433
3.06 . 3.07.01.01 . 18 . 01	Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional	54,685,000	33,076,500
3.06 . 3.07.01.01 . 18 . 04	Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	700,000,000	1,051,797,500
3.06 . 3.07.01.01 . 18 . 06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	115,000,000	97,809,000
3.06 . 3.07.01.01 . 18 . 07	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	62,400,000	53,843,100
3.06 . 3.07.01.01 . 18 . 08	Pembangunan Pasar Rakyat	20,540,851,333	20,698,851,333
3.06 . 3.07.01.01 . 18 . 09	Kegiatan Pasar Murah	210,000,000	196,000,000
3.07 . 3.07.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,266,717,000	3,332,300,645
3.07 . 3.07.01.01 . 01 . 01	penyediaan jasa surat menyurat	11,599,039	6,400,000
3.07 . 3.07.01.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	107,000,000	83,934,000
3.07 . 3.07.01.01 . 01 . 07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	1,369,770,000	1,365,382,000
3.07 . 3.07.01.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15,000,000	7,500,000

3.07 . 3.07.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	155,941,406	135,000,000
3.07 . 3.07.01.01 . 01 . 11	Penyediaan Brang Cetak dan Penggandaan	115,000,000	169,466,108
3.07 . 3.07.01.01 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64,000,000	47,800,000
3.07 . 3.07.01.01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	22,435,492	13,461,300
3.07 . 3.07.01.01 . 01 . 15	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	15,000,000	8,700,000
3.07 . 3.07.01.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	74,431,692	66,293,010
3.07 . 3.07.01.01 . 01 . 18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	380,741,410	255,000,000
3.07 . 3.07.01.01 . 01 . 19	Rapat - rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah	855,797,961	893,038,961
3.07 . 3.07.01.01 . 01 . 21	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Negeri	680,000,000	0
3.07 . 3.07.01.01 . 01 . 22	Rapat Teknis Indagkop se Kalimantan Utara	400,000,000	280,325,266
3.07 . 3.07.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	607,000,000	512,350,000
3.07 . 3.07.01.01 . 02 . 11	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas	427,000,000	424,400,000

3.07 . 3.07.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	180,000,000	87,950,000
3.07 . 3.07.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	71,976,670	17,247,677
3.07 . 3.07.01.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	71,976,670	17,247,677
3.07 . 3.07.01.01 . 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah*	9,969,702,667	10,341,452,667
3.07 . 3.07.01.01 . 16 . 01	Pelatihan Peningkatan Kemampuan bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan Sumber Daya	108,000,000	0
3.07 . 3.07.01.01 . 16 . 06	Pembinaan dan Pengembangan bagi Pelaku Industri kecil dan Menengah	607,000,000	711,900,000
3.07 . 3.07.01.01 . 16 . 10	Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri	9,254,702,667	9,629,552,667
3.07 . 3.07.01.01 . 17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri*	300,400,000	60,025,000
3.07 . 3.07.01.01 . 17 . 01	Kegiatan pembinaan kemampuan teknologi industri	200,400,000	0
3.07 . 3.07.01.01 . 17 . 03	perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur	100,000,000	60,025,000
Jumlah		46,930,433,617	43,817,587,122

2.2.2 Realisasi Program dan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020

Pada Setiap bulan setiap OPD di Lingkungan Provinsi Kalimantan Utara membuat Laporan Realisasi Anggaran, dimana Laporan tersebut menampilkan informasi atas Capaian Realisasi Program Kegiatan yang telah dilaksanakan pada satu bulan tersebut. Berikut disampaikan data Rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

*Tabel 2.3 Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Disperindagkop & UKM Tahun 2020*

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp.)
			Fisik	Keuangan		
			%	Rp.	%	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,817,837,981	96.18	3,671,981,457	96.18	145,856,524
5.1.1	Belanja Pegawai	3,817,837,981	96.18	3,671,981,457	96.18	145,856,524
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	223,513,839	95.47	213,391,743	95.47	10,122,096
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3,594,324,142	96.22	3,458,589,714	96.22	135,734,428
	BELANJA LANGSUNG	39,999,749,141	86.60	34,393,313,932	85.98	5,606,435,209
2.11 . 3.07.01.01 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah*	2,617,700,000	85.50	2,237,327,612	85.47	380,372,388

2.11 . 3.07.01.01 . 16 . 06	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	1,900,000,000	93.59	1,778,193,012	93.59	121,806,988
2.11 . 3.07.01.01 . 16 . 07	Pelatihan Manajemen Pengelolaan koperasi/KUD	429,380,000	44.90	192,813,600	44.91	236,566,400
2.11 . 3.07.01.01 . 16 . 08	Sosialisasi HAKI kepada usaha mikro kecil menengah	104,320,000	91.87	95,235,000	91.29	9,085,000
2.11 . 3.07.01.01 . 16 . 12	Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM	3,000,000	100.00	3,000,000	100.00	0
2.11 . 3.07.01.01 . 16 . 18	Sosialisasi dukungan informasi penyesuaian permodalan	181,000,000	92.95	168,086,000	92.87	12,914,000
2.11 . 3.07.01.01 . 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**	238,500,000	67.55	149,698,200	62.77	88,801,800
2.11 . 3.07.01.01 . 18 . 05	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	62,000,000	70.34	43,331,200	69.89	18,668,800
2.11 . 3.07.01.01 . 18 . 09	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	176,500,000	66.57	106,367,000	60.26	70,133,000
3.06 . 3.07.01.01 . 15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan*	410,900,000	97.38	396,236,758	96.43	14,663,242
3.06 . 3.07.01.01 . 15 . 01	Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	72,300,000	98.66	71,325,998	98.65	974,002

3.06 . 3.07.01.01 . 15 . 02	Penyelesaian permasalahan- permasalahan pengaduan konsumen	175,600,000	95.55	163,884,660	93.33	11,715,340
3.06 . 3.07.01.01 . 15 . 03	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan jasa	163,000,000	98.79	161,026,100	98.79	1,973,900
3.06 . 3.07.01.01 . 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor*	337,895,719	90.25	304,264,030	90.05	33,631,689
3.06 . 3.07.01.01 . 17 . 02	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	60,918,047	54.70	33,325,111	54.70	27,592,936
3.06 . 3.07.01.01 . 17 . 08	Membangun jejaring dengan eksportir	54,000,000	90.74	48,999,500	90.74	5,000,500
3.06 . 3.07.01.01 . 17 . 12	Pembangunan promosi perdagangan Internasional	69,003,440	99.51	68,666,487	99.51	336,953
3.06 . 3.07.01.01 . 17 . 13	Peningkatan kapasitas pelaku usaha perdagangan international	103,863,318	100.00	103,374,218	99.53	489,100
3.06 . 3.07.01.01 . 17 . 14	Pengelolaan Isu-isu Perdagangan Internasional	50,110,914	100.00	49,898,714	99.58	212,200
3.06 . 3.07.01.01 . 18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri*	22,131,377,433	91.52	20,047,254,974	90.58	2,084,122,459
3.06 . 3.07.01.01 . 18 . 01	Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional	33,076,500	91.87	30,385,927	91.87	2,690,573

3.06 . 3.07.01.01 . 18 . 04	Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	1,051,797,500	92.41	970,456,448	92.27	81,341,052
3.06 . 3.07.01.01 . 18 . 06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	97,809,000	99.25	97,074,864	99.25	734,136
3.06 . 3.07.01.01 . 18 . 07	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	53,843,100	78.93	42,497,316	78.93	11,345,784
3.06 . 3.07.01.01 . 18 . 08	Pembangunan Pasar Rakyat	20,698,851,333	91.42	18,780,789,419	90.73	1,918,061,914
3.06 . 3.07.01.01 . 18 . 09	Kegiatan Pasar Murah	196,000,000	97.06	126,051,000	64.31	69,949,000
3.07 . 3.07.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,332,300,645	94.98	3,160,964,834	94.86	171,335,811
3.07 . 3.07.01.01 . 01 . 01	penyediaan jasa surat menyurat	6,400,000	99.95	6,323,000	98.80	77,000
3.07 . 3.07.01.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	83,934,000	99.96	83,815,016	99.86	118,984
3.07 . 3.07.01.01 . 01 . 07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	1,365,382,000	97.24	1,324,701,883	97.02	40,680,117
3.07 . 3.07.01.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	7,500,000	100.00	7,497,000	99.96	3,000
3.07 . 3.07.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	135,000,000	100.00	134,988,150	99.99	11,850

3.07 . 3.07.01.01 . 01 . 11	Penyediaan Brang Cetakan dan Penggandaan	169,466,108	94.26	159,782,598	94.29	9,683,510
3.07 . 3.07.01.01 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47,800,000	100.00	47,481,600	99.33	318,400
3.07 . 3.07.01.01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	13,461,300	100.00	13,460,700	100.00	600
3.07 . 3.07.01.01 . 01 . 15	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	8,700,000	100.00	8,670,000	99.66	30,000
3.07 . 3.07.01.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	66,293,010	94.45	62,553,000	94.36	3,740,010
3.07 . 3.07.01.01 . 01 . 18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	255,000,000	77.06	195,913,672	76.83	59,086,328
3.07 . 3.07.01.01 . 01 . 19	Rapat - rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah	893,038,961	93.55	835,452,949	93.55	57,586,012
3.07 . 3.07.01.01 . 01 . 22	Rapat Teknis Indagkop se Kalimantan Utara	280,325,266	100.00	280,325,266	100.00	0
3.07 . 3.07.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	512,350,000	99.84	511,547,000	99.84	803,000
3.07 . 3.07.01.01 . 02 . 11	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas	424,400,000	100.00	424,400,000	100.00	0
3.07 . 3.07.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	87,950,000	99.09	87,147,000	99.09	803,000

3.07 . 3.07.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	17,247,677	100.00	17,247,677	100.00	0
3.07 . 3.07.01.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	17,247,677	100.00	17,247,677	100.00	0
3.07 . 3.07.01.01 . 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah*	10,341,452,667	72.82	7,511,343,456	72.63	2,830,109,211
3.07 . 3.07.01.01 . 16 . 06	Pembinaan dan Pengembangan bagi Pelaku Industri kecil dan Menengah	711,900,000	98.97	704,318,602	98.94	7,581,398
3.07 . 3.07.01.01 . 16 . 10	Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri	9,629,552,667	70.88	6,807,024,854	70.69	2,822,527,813
3.07 . 3.07.01.01 . 17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri*	60,025,000	95.68	57,429,391	95.68	2,595,609
3.07 . 3.07.01.01 . 17 . 03	perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur	60,025,000	95.68	57,429,391	95.68	2,595,609
Jumlah Realisasi S.D Desember		43,817,587,122	87.44	38,065,295,389	86.87	5,752,291,733

Tahun anggaran 2020 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Menerima Pagu anggaran sebesar Rp. 37.367.432.670,- dan setelah dilakukan Perubahan Anggaran pada bulan Agustus 2020 Pagu anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM menjadi Rp. 43.817.587.122,-

Belanja Langsung :

a. Sekretariat

Alokasi anggaran Rp. 3.861.898.322,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.689.759.511,- atau sebesar 95,54% dan sisa lebih pagu anggaran sebesar Rp. 172.138.811,-

b. Perindustrian

Alokasi anggaran Rp. 10.401.477.667,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.568.772.857,- atau sebesar 72,77% dan sisa lebih pagu anggaran sebesar Rp. 2.832.704.820,-

c. Perdagangan Dalam Negeri

Alokasi anggaran Rp. 22.542.277.433,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.443.491.732,- Atau Sebesar 90,69% dan sisa lebih pagu anggaran sebesar Rp. 2.098.785.701,-

d. Perdagangan Luar Negeri

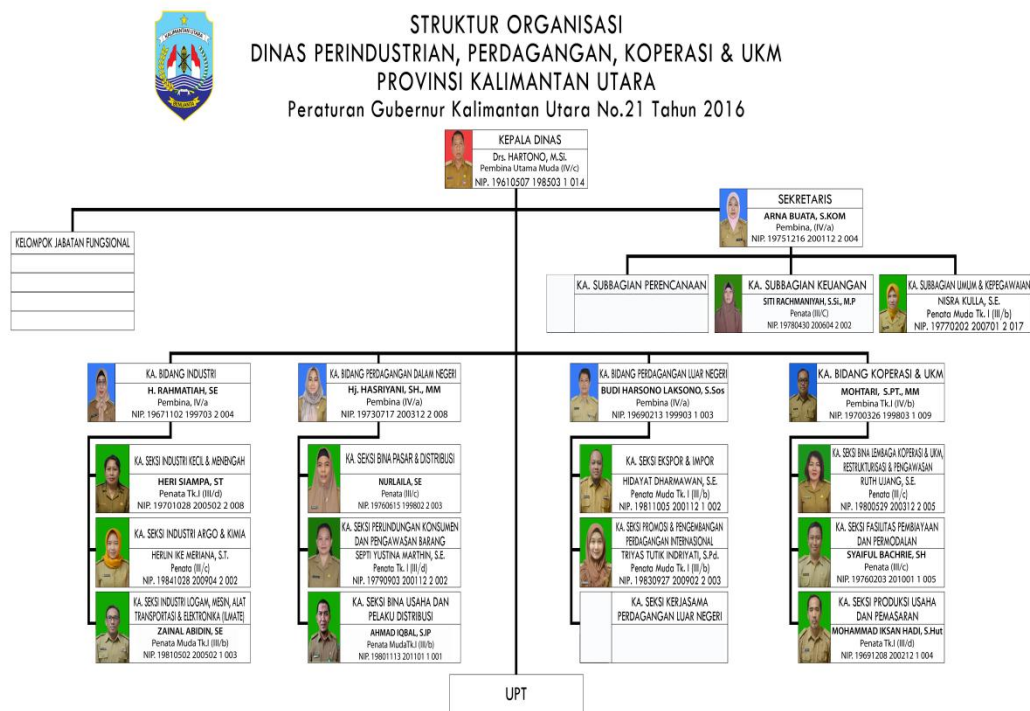
Alokasi anggaran Rp. 337.895.719,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 304.264.030,- atau sebesar 90,05% dan sisa lebih pagu anggaran sebesar Rp. 33.631.689,-

e. Koperasi dan UKM

Alokasi anggaran Rp. 2.856.200.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.387.025.812,- atau sebesar 83,57% dan sisa lebih pagu anggaran sebesar Rp. 469.174.188,-

2.3 Kondisi Sarana & Prasarana

2.3.1 Struktur Organisasi Tahun 2020



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Disperindagkop & UKM Tahun 2020

Sesuai dengan dengan Peraturan Gubernur Nomor 09 Tahun 2016, yang didalamnya terdapat Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang menaungi 4 (Empat) Bidang dan 1 Sekretariat. Bidang tersebut antara lain Bidang Industri, Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Bidang Perdagangan Luar Negeri serta Bidang Koperasi dan UKM.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan memiliki 3 (Tiga) Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Kepala Sub Bagian Keuangan. Bidang Industri Dipimpin oleh Kepala Bidang Industri dan memiliki 3 (Tiga) Kepala Seksi yaitu; Kepala Seksi IKM, Kepala

Seksi Industri Agro dan Kepala Seksi ILMATE. Bidang Perdagangan Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan memiliki 3 (Tiga) Kepala Seksi yaitu; Kepala Seksi Pasar dan Distribusi, Kepala Seksi Perlindungan Konsumen, dan Kepala Seksi Bina Usaha dan Pelaku Distribusi. Bidang Perdagangan Luar Negeri dipimpin oleh Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri dan memiliki 3 (Tiga) Kepala Seksi yaitu; Kepala Seksi Ekspor dan Impor, Kepala Seksi Promosi & Pengembangan Perdagangan Internasional, dan Kepala Seksi Kerjasama Perdagangan Luar Negeri. Bidang Koperasi dipimpin oleh Kepala Bidang Koperasi dan UKM juga memiliki 3 (Tiga) Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Bina Lembaga Koperasi dan UKM, Restrukturisasi dan Pengawasan, Kepala Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan, dan Kepala Seksi Produksi Usaha dan Pemasaran.

2.3.2 Personil OPD

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2020 memiliki aparatur sipil negara yang terdiri Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kerja Kontrak. Berikut ini disajikan tabel Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Pangkat, Jenis Kelamin dan Pendidikan.

Tabel 2.4 Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat/Gol. Ruang, Jenis Kelamin, dan Pendidikan

Tahun	Pangkat/Gol. Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah Pegawai
	IV	III	II	I	L	P	S2	S1	D3	SMA/SMK	SLTP	SD	
2020	9	42	5	-	31	25	3	46	3	4	-	0	56

Berikut ini disajikan Tabel Tenaga Kerja Kontrak menurut pendidikan dan jenis kelamin di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Tabel 2.5 Tenaga Kerja Kontrak menurut Pendidikan Dan Jenis Kelamin

Tahun	Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah Pegawai Kontrak
	L	P	S2	S1	D3	SMA/ SMK	SLTP	SD	
2020	13	9	0	10	1	11	0	0	22

Berikut tabel Pegawai Negeri Sipil menurut pendidikan dan jenis kelamin pada masing-masing bidang di Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.

Tabel 2.6 Pegawai Negeri Sipil menurut pendidikan dan jenis kelamin pada masing-masing bidang

No.	Bagian / Bidang	P E N D I D I K A N												Jumlah	
		SD		SLTP		SMA/SMK		D3		S1		S2			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Sekretariat	0	0	0	0	1	1	1	3	2	6	1	1	5	12
2.	Bidang Industri	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	4	4
3.	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	0	0	0	0	1	0	0	0	3	4	0	2	4	6
4	Bidang Perdagangan Luar Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	1	0	8	1
5.	Bidang Koperasi & UKM	0	0	0	0	0	0	0	0	9	3	1	0	10	3
J U M L A H														31	25

Berikut disajikan Tabel Pendidikan dan Jenis Kelamin Tenaga Kerja Kontrak pada masing-masing bidang.

Tabel 2.7 Tenaga Kerja Kontrak menurut pendidikan dan jenis kelamin pada masing-masing bidang

No.	Bagian / Bidang	P E N D I D I K A N												Jumlah	
		SD		SLTP		SMA/SMK		D3		S1		S2			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Sekretariat	0	0	0	0	6	3	0	0	2	5	0	0	8	8
2.	Bidang Industri	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
3.	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0
4.	Bidang Perdagangan Luar Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
5.	Bidang Koperasi & UKM	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
J U M L A H														13	9

2.3.3 Sarana dan Prasarana OPD

Dari Tahun 2013 sampai dengan 2020 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara telah melengkapi berbagai sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perkantoran dan kegiatan teknis yang digunakan pada program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara. Berikut daftar Inventaris Barang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara :

Tabel. 2.8 Daftar Inventaris Barang Disperindagkop & UKM

No	Nama Barang	Jumlah	Tahun	Keadaan Barang	Keterangan
1	Motor	3 Unit 6 Unit	2013 2014	Baik Baik	

2	Mobil	3 Unit 4 unit	2013 2014	Baik Baik	
3	PC Lenovo	2 Unit 2 Unit	2013 2014	Baik Baik	
	PC Acer	5 Unit 2 Unit 1 Unit 5 Unit	2015 2016 2017 2018	Baik Baik Baik Baik	
	PC HP	4 Unit 2 Unit	2019 2020	Baik Baik	
4	Laptop Acer	2 Unit	2014	Baik	
	Laptop Asus	5 Unit	2014	Baik	
	Laptop Asus A555	6 Unit	2015	Baik	
	Laptop Asus	5 Unit	2015	Baik	
	Laptop Asus	2 Unit 2 unit	2016 2017	Baik Baik	
5	Filling Kabinet	6 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit	2014 2015 2017 2018 2019	Baik Baik Baik Baik Baik	
5	Lemari Arsip	3 Unit 5 Unit 5 Unit 2 Unit	2014 2017 2019 2020	Baik Baik Baik Baik	
7	Lemari Kaca	2 Unit	2018	Baik	
8	Bingkai / Pigura	4 Unit	2018	Baik	
9	Lemari Kayu	7 Unit 7 Unit 2 Unit	2014 2015 2019	Baik Baik Baik	

10	Printer Brother	1 Unit	2014	Baik	
	Printer Canon Pixma	5 Unit	2014	Baik	
	Printer Epson L210	2 Unit	2014	Baik	
	Printer LX310	1 Unit	2014	Baik	
	Printer HP Laserjet	3 Unit	2015	Baik	
	Printer Epson L220	7 Unit	2015	Baik	
	Printer Epson L220	7 Unit	2016	Baik	
	Printer Xerox Multi Fungsi	1 Unit	2016	Baik	
	Printer Dot Matrik LX-310	1 Unit	2016	Baik	
	Printer Canon Pixma G4010	1 Unit	2019	Baik	
	Printer Epson L5190	1 Unit	2020	Baik	
	Printer Epson L5191	1 Unit	2020	Baik	
11	Handy Cam Sony	1 Unit	2014	Baik	
	Camera	2 Unit	2014	Baik	
12	Unit Power Supply (UPS)	8 Unit	2015	Baik	
		3 Unit	2017	Baik	
13	Mesin Ketik Manual	5 Unit	2015	Baik	
		2 Unit	2016	Baik	
14	Mesin Ketik Elektrik	4 Unit	2014	Baik	

15	Lemari Es	2 Unit 1 Unit	2014 2015	Baik Baik	
	Dispenser	2 Unit 1 Unit	2014 2018	Baik Baik	
16	Alat Penghancur Kertas	1 Unit 4 Unit	2014 2015	Baik Baik	
17	Kipas Angin	3 Unit	2014	Baik	
18	Proyektor	1 Unit	2014	Baik	
19	Meja Rapat	1 Unit 1 Unit	2014 2016	Baik Baik	
20	Papan Pengumuman	1 Unit	2014	Baik	
	Papan Intansi	1 Unit	2015	Baik	
	Papan Visual	1 Unit	2018	Baik	
	Papan Display	1 Unit 1 Unit	2018 2019	Baik Baik	
21	AC Unit	4 Unit	2014	Baik	
		5 Unit	2015	Baik	
		2 Unit	2016	Baik	
22	Televisi	2 Unit	2014	Baik	
		2 Unit	2015	Baik	
		1 Unit	2016	Baik	
23	Sound System	1 Unit	2018	Baik	
	Wireless	2 Unit	2016	Baik	
	Mesin Absensi	1 Unit	2015	Baik	
24	Lemari Besi	1 Unit	2014	Baik	
		1 Unit	2015	Baik	
25	Sofa	3 Unit	2014	Baik	
26	Rak Kayu	4 Unit	2014	Baik	
		1 Unit	2019	Baik	
27	Rak Penyimpanan	3 Unit	2018	Baik	
28	Mesin Penghitung Uang	1 Unit	2015	Baik	
29	Meja Kerja Pejabat Ess II	1 Unit	2013	Baik	
		1 Unit	2016	Baik	

30	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1 Unit 4 Unit 1 Unit	2013 2014 2016	Baik Baik Baik	
31	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	4 Unit 34 Unit 2 Unit	2013 2015 2018	Baik Baik Baik	
32	Kursi Kerja Pejabat Ess II	1 Unit 1 Unit	2013 2014	Baik Baik	
33	Kursi Kerja Eselon III	5 Unit 1 Unit	2013 2018	Baik Baik	
34	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4 Unit	2018	Baik	
35	Kursi Pejabat Lain-Lain	15 Unit	2013	Baik	
36	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4 Unit 10 Unit 3 Unit	2014 2018 2019	Baik Baik Baik	
37	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	9 Unit 14 Unit	2014 2018	Baik Baik	
38	Kursi Kerja Non Struktural	31 Unit 14 Unit	2014 2018	Baik Baik	
39	Kursi Rapat	20 Buah 24 Buah	2014 2016	Baik Baik	
40	Kursi Putar	20 Buah	2015	Baik	
41	Tenda	50 Unit 50 Unit	2015 2017	Baik Baik	
42	Meja Komputer	2 Unit 1 Unit	2014 2019	Baik Baik	
43	Genset	1 Unit	2016	Baik	
44	Hardisk	6 Unit	2020	Baik	

2.4 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020 terdapat beberapa permasalahan yang dimana permasalahan tersebut harus diupayakan untuk dipecahkan pada tahun selanjutnya.

Tabel 2.9 Hambatan di Tahun Anggaran 2020

No	Sasaran Strategis	Hambatan	Upaya yang dilakukan ditahun berikutnya
1	2	3	4
1	Meningkatnya Daya Saing Industri	Masih terdapat IKM yang belum memenuhi standarisasi produk sehingga masih kalah bersaing dalam penjualannya Keterbatasan Inovasi dalam pengolahan produk olahan berbahan dasar SDA lokal	Akan dilakukan sosialisasi dan pelatihan tentang pengolahan produk menggunakan teknologi dan memberikan pelatihan tentang bagaimana mengolah produk yang berbahan dasar SDA lokal agar dapat menjadi produk unggulan IKM di Kalimantan Utara.
2	Meningkatnya Daya Saing Perdagangan Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap	Keterbatasan fasilitas penunjang perdagangan dalam negeri, Masih banyaknya pelaku usaha yang belum berorientasi ekspor dan masih terdapat pelaku usaha yang belum sadar akan	Pada tahun berikutnya dibangun beberapa pasar di daerah terepencil untuk menunjang perdagangan dalam negeri dan akan dilakukan Sosialisasi kepada pelaku ekspor dan melakukan promosi terhadap produk lokal ke pasar internasional serta melakukan pengawasan terhadap produk barang dan jasa yang beredar dan untuk melindungi hak-hak konsumen di

	produk beredar	pentingnya melindungi hak – hak konsumen	Provinsi Kalimantan Utara.
3	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM Sehat	Masih terdapat pelaku UKM yang belum memahami mengenai manajemen keuangan sehingga mereka lebih rentan untuk mengalami kebangkrutan dan dalam perkembangan koperasi di wilayah Kalimantan utara masih didapati koperasi yang tidak aktif maupun koperasi yang aktif namun tidak melaksanakan kewajibanya dalam mengelola koperasi seperti RAT dan belum tersertifikasi dari Kementrian Koperasi dan UKM	Akan dilakukan dan diteruskan melakukan pendampingan melalui kegiatan pendampingan koperasi dan UKM yang bersumber dari dana DAK Kementerian Koperasi dan UKM serta memberikan reward kepada koperasi berprestasi dan hukuman pembubaran kepada koperasi yang tidak melaksanakan penyelenggaraan koperasi sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban sebuah OPD atas capaian kinerja yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) OPD ini nantinya akan menjadi bahan LPPD Provinsi dimana akan dievaluasi untuk melihat Sejauh mana capaian kinerja yang telah atau dapat dilaksanakan.

Dengan tersusunnya LPPD Dinas Perindustrian, Peragangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu memberikan informasi yang diperlukan sebagai bahan pendukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Utara.

Tanjung Selor, 29 Januari 2021

Kepala Dinas,



Drs. Hartono, M.Si
Penyelia Utama Muda, IV/c
NIP. 19610507 198503 1 014